BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang tidak pernah luput dari perhatian pemerintah suatu negara dibelahan dunia manapun. Kemiskinan bahkan menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan pemerintah negara dari waktu ke waktu, terlebih pada negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kategori berkembang menyadari bahwa pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah.

Kemiskinan menjadi fenomena tersendiri sepanjang sejarah Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia yang awalnya begitu tinggi yaitu sekitar 40% pada tahun 1976, telah berhasil mengalami penurunan menjadi sekitar 11 persen pada tahun 1996. Pada tahun 1998 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 24,2% yang utamanya disebabkan oleh meroketnya harga-harga komoditas baik makanan maupun non-makanan.

Menurut Suryawati dalam (Evi Adriani dan Wahyudi, 2015), Kemiskinan dalam arti sempit dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas kemiskinan adalah keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang, keluarga, komunitas bahkan negara untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan akses sosial ekonomi lainnya. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensi, oleh karena itu, upaya pengantasan kemiskinan harus dilakukan secara kompherensif mencakup kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu.

Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parahnya lagi kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang secara terbatas.

Menurut Arsyad dalam (Muhammad Amali, 2017) Lingkaran kemiskinan terjadi karena suatu kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain, intinya konsep lingkaran kemiskinan mengasumsikan bahwa: (1) ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup; (2) kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan investasi modal; dan (3) tingkat pendidikan dan keahlian masyarkat yang relatif masih rendah, merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi di berbagai negara sedang berkembang.

Kemiskinan sebagai masalah berskala nasional selalu dihadapi setiap pemerintahan. Kemiskinan terjadi dari akumulasi berbagai persoalan dan melibatkan banyak dimensi pokok. Bank Dunia sendiri menyebut bahwa kemiskinan sebagai hasil dari akuntabilitas dan responsibilitas institusi negara.

Menyadari bahwa kemiskinan bersifat multi-dimensi dan mencerminkan akuntabilitas dan responsibilitas dari institusi negara, maka upaya pengentasan kemiskinan menjadi sala satu obyek tanggung jawab pemerintah. Berikut

merupakan data Persentase Penduduk Miskin (Persen) di Provinsi Jambi tahun 2002-2021, dimana ditunjukkan pada tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jambi Tahun 2002-2021

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	Perkembangan (%)
2002	13,18	-
2003	12,74	(3,33)
2004	12,45	(2,27)
2005	11,88	(4,57)
2006	11,37	(4,29)
2007	10,27	(9,67)
2008	9,28	(9.64)
2009	8,55	(7,86)
2010	8,40	(1,75)
2011	7,90	(5,95)
2012	8,28	4,81
2013	8,41	1,57
2014	8,39	(0,23)
2015	8,86	5,60
2016	8,41	(5,07)
2017	8,19	(2,61)
2018	7,92	(3,29)
2019	7,60	(4,04)
2020	7,58	(0,26)
2021	8,09	**6,72**
Rata-Rata		**(0,74)**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2021)
Keterangan : ( ) = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jambi selama periode 2002-2021 setiap tahunnya mengalami fluktuasi yang cenderung menurun, dilihat dari perkembangan tahun 2011 mengalami penurunan dengan perkembangan sebesar -5,95%, dan pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di provinsi jambi mengalami kenaikan yang signifikan dengan perkembangan sebesar 5,60%. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di provinsi jambi

mengalami penurunan yang signifikan dengan perkembangan sebesar -0,26%. Dan pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di provinsi jambi kembali meningkat dengan perkembangan sebesar 6,72%.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yaitu jumlah penduduk yang tinggi. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang tinggi. Menurut Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro dalam (Irhamni, 2018) Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk yang dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi.

Menurut Suryawati dalam (Elvira Handayani Jacobus et al, 2018) Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-

rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.

Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara sifatnya, sebab permintaan efektif *(effective demand)* akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang. Berikut merupakan data jumlah penduduk di Provinsi Jambi (Jiwa) tahun 2002-2021, dimana ditunjukkan pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2002-2021

Tahun	Persentase Penduduk (jiwa)	Perkembangan (%)
2002	2.484.027	0
2003	2.568.598	3.29
2004	2.619.553	1.95
2005	2.635.968	0.62
2006	2.683.099	1.76
2007	2.742.196	2.16
2008	2.788.269	1.65
2009	2.834.164	1.62
2010	3.092.265	8.35
2011	3.169.814	2.45
2012	3.169.814	0
2013	3.317.034	4.44
2014	3.344.421	0.82
2015	3.402.052	1.69
2016	3.458.926	1.64
2017	3.515.017	1.60
2018	3.570.272	1.55
2019	3.624.579	1.50
2020	3.677.894	1.45
2021	3.585.121	(2.59)
Rata-Rata		**2**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2021)
Keterangan : ( ) = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jambi periode 2002-2021 selalu menurun setiap tahunnya. Jumlah Penduduk pada tahun 2011 yaitu sebesar 3.167.578 jiwa dengan perkembangan 2,45% dan mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2021 dengan Jumlah Penduduk sebesar 3.585.119 dengan perkembangan sebesar (2,59)%, dengan total rata-rata perkembangan sebesar 2%.

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

Menurut Mankiw dalam (Susi Husila, 2019), pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh *full employment* dapat terwujud, jika tidak maka akan terjadi pengangguran. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi tingkat pendapatan masyarakat dan dengan begitu akan memberikan dampak domino mengurangi tingkat kemakmuran. Semakin turun tingkat kemakmuran masyarakat karena pengangguran tentunya akan meningkatkan peluang terjebak dalam kemiskinan dan akan menimbulkan

masalah lain yaitu kekacauan politik dan sosial (Sukirno dalam Heni Desy Oratmangun dkk, 2021).

Penumpukan jumlah angkatan kerja tentu akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian suatu negara apabila tidak disertai dengan perluasan dan penciptaan lapangan kerjanya. Jika lowongan kerja baru tidak bisa menampung semua angkatan kerja baru maka akan memperpanjang barisan pengangguran yang sudah ada. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika pengangguran dikatakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Indikator lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Pengangguran memiliki hubungan yang cukup erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, semakin tinggi angka pengangguran maka akan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di masyarakat. Oleh sebab itu masalah pengangguran harus segera diselesaikan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Jundi dalam (I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, 2018) menyebutkan bahwa pengangguran terbuka terjadi karena tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat. Tingginya tingkat pengangguran merupakan salah satu cerminan kurang berhasilnya pembangunan dalam suatu negara karena terjadi ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia.

Tingkat pengangguran suatu daerah dapat dilihat dari indikator Tingkat Pengangguran Terbuka daerah tersebut. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang

tidak terserap oleh pasar kerja serta menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Berikut merupakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi (Persen) tahun 2002-2021, dimana ditunjukkan pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi Tahun 2002-2021

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Perkembangan (%)
2002	5,78	-
2003	6,50	12,46
2004	6,04	(7,08)
2005	10,74	77,81
2006	6,62	(33,36)
2007	6,22	(6,04)
2008	5,14	(17,36)
2009	5,54	7,78
2010	5,08	(8,30)
2011	4,02	(20,87)
2012	3,22	(19,90)
2013	4,84	50,51
2014	5,08	4,96
2015	4,34	(14,57)
2016	4,00	(7,83)
2017	3,87	(3,25)
2018	3,86	(0,26)
2019	4,19	8,55
2020	5,13	22,43
2021	5,09	(0,78)
Rata-Rata		**2,84**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2021)
Keterangan : ( ) = Penurunan

Dilihat dari tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi selama periode 2002-2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan pola yang tidak tetap dilihat dari

perkembangan. Pada tahun 2006 tingkat pengangguran terbuka menurun signifikan dengan perkembangan sebesar -33,36%, Pada tahun 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat yang signifikan dengan perkembangan sebesar 50,51%, Pada tahun 2018 menurun sebesar -0,26%, Pada tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat kembali dengan perkembangan sebesar 22,43%, dan terjadi penurunan pada tahun 2021 dengan perkembangan sebesar -0,78% dengan total rata-rata perkembangan sebesar 2,84%.

Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi. Campur tangan pemerintah lebih kurang sudah sering masyarakat dengar dan rasakan baik dalam tingkat nasional maupun daerah, contoh dalam setiap kampanye memilihan umum selalu tersodor rencana program penanggulangan kemiskinan, dalam realisasinya pun sudah pernah ada Bantuan Langsung Tunai/Sementara, BOS dalam bidang pendidikan, asuransi kesehatan masyarakat miskin, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), raskin (beras miskin), dan lainnya. Didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang dialami oleh setiap warga negaranya.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan berkenaan dengan pengembangan pengetahuan serta keahlian dan keterampilan dari manusia maupun tenaga kerja dalam proses

pembangunan. Berhubung dengan kontribusinya yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi, maka pendidikan dikatakan sebagai modal manusia (human capital). Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Sudiharta dan Sutrisna dalam I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, 2018).

Pendidikan formal menjadi salah satu indikator penting dalam mencapai tingkat pendidikan yang lebih baik. Berdasarkan teori yang dikemukan oleh Arsyad dalam (Andri Nurmalita Suryandari, 2018) mengatakan bahwa pendidikan (baik formal maupun non formal) dapat berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung, yaitu melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang.

Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Berikut merupakan data Rata – rata Lama Sekolah di Provinsi Jambi (Tahun) tahun 2002-2021, dimana ditunjukkan pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4
Perkembangan Rata – Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2002-2021

Tahun	Rata – Rata Lama Sekolah (Tahun)	Perkembangan (%)
2002	7,4	0
2003	7	(5.71)
2004	7,4	5.41
2005	7,54	1.86
2006	7,6	0.79
2007	7,63	0.39
2008	7,63	0
2009	7,68	0.65
2010	7,34	(4.63)
2011	7,84	6.38
2012	7,69	(1.95)
2013	7,8	1.41
2014	7,92	1.52
2015	7,96	0.50
2016	8,07	1.36
2017	8,15	0.98
2018	8,23	0.97
2019	8,45	2.60
2020	8,55	1.17
2021	8,6	0.58
Rata-Rata	**7,82**	**0.71**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi (2021)

Keterangan : ( ) = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi periode 2002-2021 berfluktuasi cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan pola yang tidak tetap dilihat dari perkembangan. Pada tahun 2008 rata-rata lama sekolah menurun dyang signifikan dengan perkembangan sebesar 0%, Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah meningkat yang signifikan dengan perkembangan sebesar 6,38%, Pada tahun 2015 menurun kembali dengan perkembagan sebesar 0,50%, dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019

dengan perkembangan sebesar 2,60% dengan total rata-rata perkembangan sebesar 0,71%.

Kondisi ini di dukung oleh kurang meratanya kesempatan bagi sebagian penduduk dalam mengakses pendidikan di Provinsi Jambi. Padahal pendidikan merupakan salah satu hal yang memampukan masyarakat bersaing dalam dunia kerja, karena diharapkan dengan semakin tinggi pendidikan seseorang maka produktivitas orang tersebut juga semakin tinggi.

Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Pendidikan memberikan sumbangan langsung terhadap pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja. Pendidikan diharapkan dapat mengatasi keterbelakangan ekonomi lewat efeknya pada peningkatan kemampuan manusia dan motivasi manusia untuk berprestasi.

Untuk tingkat pendidikan, Kurniawan (2011) mengatakan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh kesmiskinan dengan hubungan negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan mengurangi kemiskinan karena penguasaan pendidikan dapat merubah pemikiran yang lebih maju.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul "**Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi berfluktuasi tetapi cenderung menurun dengan pola yang berbeda dilihat dari perkembangan. Adapun rata-rata penurunan Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jambi yaitu sebesar 0,74%.
2. Jumlah penduduk di Provinsi Jambi selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Jambi menurun dalam 20 tahun terakhir sebesar 2%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun. Adapun rata-rata perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di provinsi jambi dalam waktu 20 tahun terakhir sebesar 2,84%
4. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi berfluktuasi cenderung menurun dari tahun ke tahun dengan pola yang tidak tetap dilihat dari perkembangan. Adapun rata-rata perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jambi dalam waktu 20 tahun terakhir sebesar 0,71%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2002-2021 secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2002-2021 secara parsial?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2002-2021 secara simultan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Tingkat Pengangguran (TPT) dan Tingkat Pendidikan di Provinsi Jambi tahun 2002-2021 secara parsial.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademis
    a. Sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang masih berhubungan dengan penelitian ini.
    b. Diharapkan sebagai pengembangan ilmu ekonomi, khususnya tentang pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terbuka terhadap kemiskinan.
2. Praktisi
    a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukasn kepada pemerintah daerah dalam hal ini menyangkut pemerintah Indonesia.
    b. Diharapkan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka agar dapat tercapainya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat agar berkurangnya tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.